



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 5 (Lima)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan; 2. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan;
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 21 Maret 2017
Pukul	: 14.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Tantangan dan Hambatan transformasi program jaminan pensiun dari PT. Taspen dan PT. Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan. 2. Dampak berkurangnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pasca terbitnya PP No. 60 Tahun 2016 Tentang Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan. 3. Langkah-langkah perluasan kepesertaan dan manfaat hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta. 4. Meminta simulasi terkait kemungkinan dana CSR dapat digunakan untuk membayar Premi Kepesertaan dari Pekerja Informal. 5. Laporan tindak lanjut Keputusan Rapat Dengar Pendapat tanggal 7 Februari 2017.
Ketua Rapat	: H. Syamsul Bachri S, MSc/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, S.H./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl.Jend. Gatot Subroto, Jakarta
Hadir	: A. 24 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI, 6 orang Anggota Izin; B. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran. C. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dibuka pukul 14.20 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan rekomendasi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan terhadap penyelenggaraan Jaminan Sosial.
2. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan seluruh stakeholder guna membahas transformasi program jaminan pensiun dari PT TASPEN dan PT ASABRI ke BPJS Ketenagakerjaan yaitu :
 - a. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
 - b. Kementerian Keuangan RI
 - c. Kementerian Ketenagakerjaan RI
 - d. Kementerian Hukum dan HAM RI
 - e. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
 - f. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
 - g. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 - h. PT ASABRI (Persero)
 - i. PT TASPEN (Persero)
 - j. BPJS Ketenagakerjaan
3. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri RI agar seluruh pemerintah daerah memiliki komitmen dalam pelaksanaan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja yang aktif dan honorer.
4. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk membuat simulasi program Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai dengan ketentuan hak-hak normatif yang diterima oleh pekerja yang di PHK sesuai UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pelayanan kepesertaan kepada perusahaan swasta;

6. Komisi IX DPR RI meminta Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini yang diserahkan paling lambat Kamis, tanggal 7 April 2017.

Rapat diakhiri pukul 18.10 WIB

**Ketua Rapat/
Wakil Komisi IX DPR RI,**



H. SYAMSUL BACHRI S. M.Sc *h.*
A-312